

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*,  
(Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, 2020)

Bernard L Tanya, et all. *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi (Edisi Revisi), Cet.4*  
(Yogyakarta: Genta Publsihing,2013)

Djaja S.Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW Revisi Keempat*,  
(Bandung: Nuansa Aulia,2014)

E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*,  
(Jakarta: Storia Grafika, 2001)

Indra Mahawijaya, *Perjanjian Internasional dan Mahkamah Konstitusi dalam Ruang Perdebatan*,(Malang: Penerbit Media Nusa Creative,2015)

H.Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*,  
(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016)

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*  
Buku I  
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996)

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatid, Teori dan Praktik*  
(Jakarta: Bumi Aksara, 2013)

I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional-Bagian I*,  
(Bandung: Mandar Maju, 2002)

I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*  
(Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005)

Gautama (a), *Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*,  
(Bandung: Alumni,1978)

- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*,  
(Jakarta: Erlangga, 1991)
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media,  
(Bandung: Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media, 2006)
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*,  
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Kholis Roisah, *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik*  
(Malang: Penerbit Setara Press, 2015)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*  
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012)
- Mochtar Kusumaatadja dan Ety R.Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*,  
(Bandung: PT Alumni, 2003)
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*  
(Salatiga; Griya Media)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*  
(Jakarta: Kencana Cet.7 2011)
- R.Soegono Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*,  
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*  
(Bandung: Penerbit Citra Aditya, 1999)
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*,  
(Bandung: Mandar Maju, 2000)
- Suharsimi Ari Kunto, *Managemen Penelitian, Cetakan 2*  
(Jakarta: PT. Renika Cipta, 1993)

Sukarmi, et all, *Pengantar Hukum Internasional*  
(Malang: UB Press, 2019)

Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*  
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)

Serlila Aprita, *Hukum Surat-Surat Berharga*,  
(Palembang: NoerFikri Palembang, 2021)

Sri Setianingsih Suwardi dan Ida Kurnia, *Hukum Perjanjian Internasional*  
(Sinar Grafika: Jakarta, 2021)

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*  
(Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

M. Yahya Harahap, SH. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*  
(Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

## **B. Jurnal Nasional**

R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016

Agwe Sheling Dranis, Dewa Gede Sudika Mangku, I Wayan Lasmawan, “Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Melalui Konvensi *Apostille*”, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 4 Nomor 1 April 2022 P-ISSN: 2656-9639 E-ISSN:2684-9046, Universitas Pendidikan Ganesha. Ahmad Haris Junaidi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI “Urgensi dan Tantangan Indonesia dalam Akses Konvensi *Apostille*”, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 7 Nomor 2 Agustus 2018 ISSN 2089-9009.

Monica Agustina Gloria “Arti Penting *Apostille Certified* Bagi Pengesahan Dokumen” Res Judicata, Volume 4, Nomor 1, 2021,ISSN: 2621-1602

Zaenul Abidin, Jordan Alexander Wirasasmita dan Zaenal Alim, “Kekuatan Hukum Surat Kuasa dari Luar Negeri yang Tidak Dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia”,

*Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Volume 5 Nomor 1 Agustus 2022 ISSN:2622-3740, Universitas Airlangga.

### **C. Hasil Penelitian**

Citra Astungkoro Sukmawirawan, “Kekuatan Pembuktian Legalisasi dan Waarmerking Akta di Bawah Tangan Oleh Notaris”. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014

Stella Eugenia Atmadja, “Peranan Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Asing berdasarkan *The Hague Convention Abolshing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents* 1961 Dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris”, Tesis, Jakarta: Program Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariata Universitas Pelita Harapan, 2019.

Putry Maulani Yanuanty, “Kewajiban Legalisasi Dokumen yang Ditandatangani di Luar Negeri Berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia” Tesis, Jakarta: Program Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariata Universitas Pelita Harapan, 2018.

Arif Arfinanto, “Fungsi Notaris Dalam Memberikan Legalisasi Atas Akta di Bawah Tangan” Tesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 2019.

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau BW, Staatsblad 1847 No. 23)

Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 25 Mei 1909 No.32 (Lembaran Negara Hindia Belanda 09-291)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalization for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat Pada Dokumen di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 tahun 2019 tentang Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Umum Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris  
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.03.01 Tahun 2022 tentang Dokumen Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

*The Hague Convention Abolshing The Requirement of Legalization For Foreign Public Documents* 1961

*Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969.

#### **E. Putusan**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 18 September 1986 Nomor: 3038 K/Pdt/1981

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 60/Pdt.G/2008/PTA.Sby

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

## **F. Website/Internet**

Treaty Handbook Treaty Section of the Office of Legal Affairs, United Nations  
<https://treaties.un.org/doc/source/publications/thb/english.pdf> diakses pada 14 April 2023

PT Justika Siar Publika, “Legalisasi Dokumen”  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4bfe8129e91a5/legalisasi-dokumen;>  
diakses pada 25 April 2023

## **G. Kamus**

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (Bostob: St Paul Minn West Publishing.Co, 1991)

